

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan paling penting bagi negara berkembang seperti Indonesia. Masalah sumber daya tersebut tidak bisa terlepas dari bidang pendidikan, yang secara umum di identikkan dengan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah maupun dengan perguruan tinggi. Seperti yang diungkapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, salah satu tujuan negara Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk memperlancar tujuan tersebut maka dibutuhkanlah sebuah lembaga pendidikan yang disebut sekolah. Dalam pendidikan formal (sekolah) ada beberapa jenjang pendidikan, mulai dari yang paling dasar sampai dengan yang paling tinggi. Salah satu jenjang pendidikan di Indonesia adalah Sekolah Menengah Atas (SMA).

Terkait dengan dunia pendidikan, tujuan dari dunia pendidikan adalah untuk menciptakan manusia yang berkualitas yaitu seperti memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki kemampuan belajar yang cukup baik pula. Sehingga, untuk melihat seseorang tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan belajar yang cukup baik dapat dilihat dari prestasi belajarnya. Kebanyakan orang berasumsi bahwa prestasi akademik yang rendah berarti seseorang tersebut tidak mampu menerima materi

pelajaran dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup. Berbeda dengan yang memiliki prestasi akademik yang baik, akan dianggap memiliki pengetahuan yang baik pula dan di anggap mampu belajar. Dalam mendapatkan prestasi yang memuaskan berbagai cara dapat ditempuh oleh seorang siswa, salah satu cara yang positif adalah dengan cara belajar yang giat, sedangkan cara yang negatif adalah dengan mencontek.

Berdasarkan data dari *Human Development Indeks* (HDI) tahun 2008, Indonesia menempati posisi 112, turun dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi 107 dari 112 Negara. Hal ini mengakibatkan perlu adanya suatu usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan di setiap jenjang pendidikan.¹

Menurut data dari UNESCO yang dipublikasikan oleh *Education for All Global Monitoring Report 2011, Education Development Index (EDI)*, Indonesia berada pada posisi ke-69 atau empat strip di bawah Malaysia yang berada di posisi ke-65 dari 127 negara di dunia dan jauh tertinggal dari Brunei yang berada di posisi ke-34.²

Pada tiap tahunnya mutu pendidikan di Indonesia bisa dibilang standar atau jauh dari negara-negara maju lainnya, maka dari itu berbagai terobosan dan kebijakan penting telah diambil oleh kemdiknas dalam rangka meningkatkan akses pendidikan yang merata dan bermutu sejalan

¹Azizah Fitri, ISO Bukan Sekedar Isonisasi (<http://aziza-fitri-anakganto.blogspot.com/2014/05/iso-bukan-sekedar-isonisasi.html>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 13.45

²Rani Hardjanti, Soal pendidikan, Indonesia kalah dengan Malaysia (<http://news.okezone.com/read/2012/10/23/373/708026/soal-pendidikan-indonesia-kalah-dengan-malaysia>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 14.04

dengan komitmen yang digariskan oleh UNESCO melalui program Education for All (EFA).³

Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan nasional secara bertahap, terencana dan terukur sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan akreditasi untuk menilai kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M) dengan Peraturan Mendiknas Nomor 29 Tahun 2005.⁴

Tabel I.1

Rata-Rata Akreditasi Sekolah Menengah Atas

| Tahun | Akreditasi |
|--------------|-------------------|
| 2010 | 81,43 |
| 2011 | 78,03 |
| 2012 | 79,58 |
| 2013 | 72,47 |
| 2014 | 73,87 |

Sumber: Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah

Berdasarkan Tabel I.1 dapat dijelaskan bahwa rata-rata akreditasi sekolah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010 sampai 2011 sekolah mengalami penurunan sebesar 3,4. Rata-rata penurunan sekolah masih terus dirasakan pada tahun 2012 79,58, tahun 2013 72,47 dan tahun 2014 73,87 masih terus mengalami fluktuasi. Lalainya sekolah-sekolah yang

³Lukman Coroners, *Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan* (<http://lukmancoroners.blogspot.com/2010/05/upaya-peningkatan-mutu-pendidikan.html>) diakses pada tanggal 08 April 2015 pukul 15.47

⁴Fatah Arafat, *Makalah Penjaminan Mutu Pendidikan* (http://www.academia.edu/9548241/MAKALAH_PENJAMINAN_MUTU_PENDIDIKAN) diakses pada tanggal 09 April 2015 pukul 16.35

tidak memperpanjang status akreditasinya dan ada pula Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah yang tidak melakukan visitasi ke sekolah-sekolah untuk menilai kelayakan sekolah-sekolah tersebut.

Kriteria pemeringkatan hasil Akreditasi Sekolah/Madrasah memperoleh peringkat akreditasi A (amat baik), jika memperoleh Nilai Akhir (NA) lebih besar dari 85 sampai dengan 100, peringkat akreditasi B (baik), jika memperoleh Nilai Akhir lebih besar dari 70 sampai dengan 85, peringkat akreditasi C (cukup baik), jika memperoleh Nilai Akhir lebih besar dari atau sama dengan 56 sampai dengan 70, dengan ketentuan kriteria status terakreditasi terpenuhi.

Pada tahun 2014 sebanyak 611 sekolah di Riau tidak diperkenankan untuk menyelenggarakan Ujian Nasional (UN). Hal ini disebabkan sekolah-sekolah tersebut belum memiliki akreditasi. Akibatnya para siswa terpaksa menjalani UN dengan menumpang ke sekolah lain. Sekolah-sekolah yang belum memiliki akreditasi tersebut tidak hanya terdapat di kabupaten saja, tapi di ibu kota provinsi Riau dan Pekanbaru juga cukup banyak belum terakreditasi. Jumlahnya mencapai 69 sekolah. Di Pekanbaru dari 611 sekolah yang belum memiliki akreditasi itu, untuk tingkat SD sebanyak 208 sekolah, SLTP/MTs sebanyak 216 sekolah, dan SLTA sebanyak 79 sekolah, SMK sebanyak 85 sekolah dan SLB 23 sekolah. Jumlah sekolah yang paling banyak belum terakreditasi terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yaitu sebanyak 122 sekolah dari 1.071 sekolah

yang ada. Sedangkan daerah yang paling sedikit sekolahnya belum terakreditasi adalah Kabupaten Pelalawan hanya 13 sekolah.⁵

Kurangnya mutu pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: profesional guru, kurikulum, fasilitas pendidikan, kepala sekolah dan biaya pendidikan.⁶

Dalam perspektif makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, yaitu: faktor kurikulum, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan khususnya dalam kegiatan proses belajar mengajar, aplikasi metode, strategi dan pendekatan pendidikan yang mutakhir dan modern, biaya pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang profesional, sumberdaya manusia profesional.⁷

Ukuran penyelenggaraan pendidikan bermutu tidak terlepas dari delapan standar nasional pendidikan oleh BSNP yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui PP No.19/2005. Terdapat delapan SNP antara lain:

- 1) Standar Isi
- 2) Standar Proses
- 3) Standar Kompetensi Lulusan
- 4) Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- 5) Standar Sarana dan Prasarana
- 6) Standar Pengelolaan
- 7) Standar Pembiayaan
- 8) Standar Penilaian⁸

Faktor pertama yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu guru profesional. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional

⁵Rgi/Ad, Belum memiliki akreditasi, 611 sekolah tak bisa laksanakan UN (<http://www.riau.go.id/home/content/2014/03/12/1344-belum-miliki-akreditasi-611-sekolah-tak-bisa-laksanakan>) di akses pada tanggal 12 April 2015 pukul 22.13

⁶ Indra Bastian, *Akuntansi Pendidikan* (Jakarta : Erlangga, 2006), p.193

⁷ Abdul hadis dan Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010), p. 3

⁸ http://bsnp-indonesia.org/id/?page_id=61 diakses pada tanggal 10 April 2015 pukul 13.16

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Secara struktural, kedudukan guru memiliki peranan yang sangat sentral, dapat dikatakan bahwa guru merupakan tulang punggung pendidikan. Kualitas seorang guru terhadap mutu pendidikan yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru yang diberikan kepada anak didiknya yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kelulusan, baik dalam kualitas pribadi, moral, pengetahuan mampu kompetensi kerja.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 membahas tentang standar kualifikasi dan kompetensi guru dimana disebutkan bahwa setiap guru wajib memenuhi standar kualitas akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional, juga bahwa guru-guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik diploma empat (D-IV) atau sarjana akan diatur dengan peraturan menteri tersendiri, yaitu: Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi, Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu,

dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi, dan Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

Pada tahun 2013 dari sisi kualifikasi pendidikan, hingga saat ini dari 2,92 juta guru, baru sekitar 51 persen yang berpendidikan S-1 atau lebih, sedangkan sisanya belum berpendidikan S-1. Begitu pun dari persyaratan sertifikasi hanya 2,06 juta guru atau sekitar 70,5 persen guru yang memenuhi syarat. Sedangkan 861.67 guru lainnya belum memenuhi syarat sertifikasi, yakni sertifikat yang menunjukkan guru tersebut profesional.⁹

Faktor kedua yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu kurikulum. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Bab I pasal 1 ayat 19 berbunyi: Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Kurikulum yang pernah diberlakukan di Indonesia, mulai dari kurikulum tahun 1975, 1984, 1994, dan pembaharuan kurikulum di tahun 2004

⁹Jimmy Ayal, *Kemendikbud akui Kualitas guru masih rendah* (<http://www.antaraneews.com/berita/397722/kemdikbud-akui-kualitas-guru-masih-rendah>) diakses pada tanggal 12 April 2015 pukul 23.39

(KBK) tidak dapat membuat Indonesia dengan hasil yang baik.¹⁰ Pelaksanaan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang di dalamnya terdapat pembelajaran materi muatan lokal dan materi pengembangan diri tidak mencerminkan hasil proses yang diharapkan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan di Indonesia, terutama di daerah pelosok Indonesia sangat tidak memadai. Kurangnya sarana dan prasarana meliputi gedung sekolah beserta isinya, serta peralatan sekolah yang menunjang proses belajar mengajar di suatu sekolah, atau lembaga tempat belajar. Sering kita lihat pembangunan gedung-gedung sekolah megah diperkotaan dengan fasilitas yang memadai untuk kegiatan belajar mengajar. Namun hal itu akan berbanding terbalik ketika kita melihat keadaan yang sebenarnya di daerah terpencil. Tidak ada fasilitas yang cukup memadai untuk menunjang kemajuan proses belajar mengajar yang mereka lakukan.¹¹Data dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010/2011 ruang kelas SMA yang rusak mencapai 3.904 dari total 111.387 ruang kelas.

Administrasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan hal yang sangat menunjang bagi tercapainya tujuan dari pendidikan. Proses belajar mengajar akan semakin sukses bila sarana dan prasarana pendidikan memadai. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan harus selalu

¹⁰Aam Amaliyanti, *Perubahan Kurikulum* (<http://megasiana.com/pedulipendidikan/perubahan-kurikulum/>) diakses pada tanggal 11 April 2015 pukul 16.06

¹¹Nur Yati, *Daerah Terpencil yang Masih Kurang Akan Fasilitas Pendidikan* (<http://edukasi.kompasiana.com/2014/04/29/daerah-terpencil-yang-masih-kurang-akan-fasilitas-pendidikan-652523.html>) diakses pada tanggal 11 April 2015 pukul 16.21

lengkapi. Pemerintah selalu berupaya untuk secara terus menerus melengkapi sarana dan prasarana pendidikan bagi seluruh jenjang dan tingkat pendidikan. Menurut analisis ekonomi, sektor pendidikan tetap tertutup untuk investasi asing karena UU No 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memungkinkan masuknya investasi asing. Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan dianggap sebagai kegiatan non-profit. Jadi investasi asing tidak bisa masuk ke sektor ini, kecuali Undang-Undangnya diubah. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Faktor keempat yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu kepala sekolah. Pada tingkat operasional Kepala Sekolah adalah orang yang berada di garis terdepan yang mengkoordinasikan upaya meningkatkan pembelajaran yang bermutu. Kepala Sekolah diangkat untuk menduduki jabatan bertanggung jawab mengkoordinasikan upaya bersama mencapai tujuan pendidikan pada level sekolah yang dipimpin. Tentu saja Kepala Sekolah bukan satu-satunya yang bertanggung jawab penuh terhadap suatu sekolah, karena masih banyak faktor lain yang perlu diperhitungkan seperti: guru, peserta didik, dan lingkungan yang mempengaruhi proses pembelajaran. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah telah ditetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yaitu: Kepribadian, Manajerial,

Kewirausahaan, Supervisi dan Sosial. Kepala Sekolah diharapkan mampu melaksanakan fungsinya baik sebagai manajer dan leader.

Nyatanya penghambat tercapainya kualitas keprofesionalan kepemimpinan kepala sekolah seperti proses pengangkatannya tidak transparan, rendahnya mental kepala sekolah yang ditandai dengan kurangnya motivasi dan semangat serta kurangnya disiplin dalam melakukan tugas, dan seringnya datang terlambat, wawasan kepala sekolah yang masih sempit, serta banyak faktor penghambat lainnya yang menghambat tumbuhnya kepala sekolah yang professional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Ini mengimplikasikan rendahnya produktivitas kerja kepala sekolah yang berimplikasi juga pada mutu (input, proses, dan output).

Dan faktor terakhir yang mempengaruhi mutu pendidikan yaitu biaya pendidikan. Seiring dengan meningkatnya harga-harga barang yang berarti turunnya nilai uang rupanya juga sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Biaya pendidikan pada masing-masing sekolah dan perguruan tinggi jumlahnya bervariasi, namun kenaikan biaya pendidikan merupakan hal yang pasti. Pendidikan bermutu itu mahal. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini

dibutuhkan biaya Rp 500.000,- sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas Rp 1 juta. Masuk SMP/SMA bisa mencapai Rp 1 juta sampai Rp 5 juta.¹²

Walaupun pada saat ini sekolah sudah mendapat dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), namun masih kurang untuk memenuhi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Bahkan program BOS dari pemerintah tidak berjalan dengan baik dan masih terdapat sekolah yang melakukan pungutan kepada siswa.¹³ Dengan adanya dana BOS, tetapi siswa masih harus membeli berbagai buku dan keperluan tambahan untuk sekolah. Selain itu, terkadang siswa masih harus mengeluarkan uang untuk mengikuti les, dan lain-lain.

Melihat penjelasan mengenai mutu pendidikan sekolah menengah atas di Indonesia, banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, peneliti akan mengadakan penelitian mengenai Pengaruh Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional Terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

¹²Risa Untari, *Mahalnya Biaya Pendidikan di Indonesia* (<http://edukasi.kompasiana.com/2014/08/13/mahalnya-biaya-pendidikan-di-indonesia-679894.html>) di akses pada tanggal 12 April 2015 pukul 19.35

¹³Saroh Ganik Haryati, *Wajah Buruk Pendidikan di Indonesia* (<http://edukasi.kompasiana.com/2012/12/21/wajah-buruk-pendidikan-di-indonesia-518560.html>) diakses pada tanggal 12 April 2015 pukul 23.51

1. Apakah terdapat pengaruh kurikulum terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
4. Apakah terdapat pengaruh biaya pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
5. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
6. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka diketahui masalah mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia pergerakan disebabkan oleh banyak faktor yang luas. Berhubung keterbatasan yang dimiliki peneliti maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah: “Pengaruh Fasilitas Pendidikan dan Guru Profesional terhadap Mutu Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia Tahun 2010-2014”.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?
3. Apakah terdapat pengaruh fasilitas pendidikan dan guru profesional terhadap mutu pendidikan Sekolah Menengah Atas di Indonesia?

E. Kegunaan Penelitian

Adapun beberapa kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru dan menambah referensi informasi serta khasanah ilmu tentang fasilitas pendidikan, guru profesional, dan mutu pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lainnya jika akan melakukan penelitian yang terkait dengan mutu pendidikan, fasilitas pendidikan, maupun guru profesional.